
DINAMIKA BUDAYA DAN AGAMA (STUDI ANALISIS ATAS PENCARIAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEBIJAKAN BUDAYA SUNDA MASA BUPATI DEDI MULYADI DI PURWAKARTA)

Riyan Haqi Khoerul Anwar¹, Andri Nurjaman¹, Muhamad Yusuf²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Corresponding Email: riyanhaqikhoerulanwar99@gmail.com

Received: 23-10-2022 / Accepted: 23-12-2022 / Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2765>

ABSTRACT

This article discusses the dynamics of culture and religion in an analytical study of the search for Islamic values in the Sundanese cultural policy of the regent of Dedi Mulyadi in Purwakarta. Dedi Mulyadi is a regent as well as a Sundanese culturalist, so in leading Purwakarta, he issued many policies based on Sundanese culture so that Purwakarta was well-known nationally and internationally. The purpose of this article is to analyze the search for Islamic values in several Sundanese cultural policies during the regent of Dedi Mulyadi in Purwakarta. This article uses a qualitative research method which is a literature study. The data in this article were obtained from library sources such as books, scientific articles, and audio-visual sources of Dedi Mulyadi's interviews on Youtube, as well as sources that are certainly related to the object of research. The data obtained are presented in a narrative-descriptive manner. The data analysis technique used is the qualitative data analysis technique of Miles et al., namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Sundanese culture-based policy of Dedi Mulyadi as the regent of Purwakarta had Islamic values and teachings substantially and essentially. One example is in the sheathing of trees, purely for beauty and aesthetics, that beauty is upheld in Islamic teachings.

Keywords: Religious Culture, Islamic Values, Sundanese Cultural Policy, Dedi Mulyadi, Purwakarta.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai dinamika budaya dan agama studi analisis atas pencarian nilai-nilai Islam dalam kebijakan budaya Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Dedi Mulyadi merupakan seorang bupati sekaligus budayawan Sunda, sehingga dalam memimpin Purwakarta banyak mengeluarkan kebijakan berbasis kebudayaan Sunda, hal ini yang menyebabkan Purwakarta menjadi terkenal secara nasional dan internasional. Tujuan artikel ini untuk menganalisis pencarian nilai-nilai Islam dalam beberapa kebijakan budaya Sunda pada masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Data-data dalam artikel ini didapatkan dari sumber yang bersifat pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber audio-visual wawancara Dedi Mulyadi di Youtube juga dijadikan sebagai sumber yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh disajikan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles dkk., yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebudayaan Sunda dari Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta memiliki nilai dan ajaran Islam secara substansi dan esensial. Salah satu contohnya adalah dalam penyarungan pohon, semata-mata untuk keindahan dan estetika, keindahan tersebut dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Budaya Agama, Nilai Islam, Kebijakan Budaya Sunda, Dedi Mulyadi, Purwakarta

1. Pendahuluan

Menurut E.B. Tylor kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, adat istiadat, dan semua keterampilan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Batas budaya ini, seperti yang dikatakan Tylor, mengekspresikan aspek material dan non-material oleh orang-orang sebagai anggota masyarakat (Jakob, 2011, p. 3).

Manusia menciptakan budaya untuk menopang kehidupan di bumi. Budaya memungkinkan orang untuk memenuhi tugasnya sebagai *khalifah*. Seiring dengan budaya, kehidupan keagamaan masyarakat juga muncul. Ralph Linton mengusulkan batas-batas budaya yang lebih spesifik, menurutnya budaya adalah komposisi perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang komponen-komponennya dimiliki bersama dan ditransmisikan oleh anggota masyarakat tertentu (Garna, 2001, p. 157). Pernyataan ini menyiratkan bahwa budaya dipandang sebagai sifat-sifat manusia. A.I. Kroeber, di sisi lain, berpendapat bahwa budaya bersifat super organik, artinya keberadaannya melampaui keberadaan individu atau organ mana pun. Budaya dimiliki oleh semua orang, tetapi bentuk dan keberadaannya tidak bergantung pada individu tertentu.

Menurut Komisi Kanada untuk UNESCO yang dikutip oleh Nur Syam, budaya ini adalah budaya yang dipelajari, dengan asumsi, adat istiadat, kepercayaan, dan aturan yang memungkinkan anggota kelompok untuk berhubungan satu sama lain, digambarkan sebagai sistem nilai yang dinamis dengan tujuan mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri (Syam, 2004, p. 13). Sedangkan arti dari masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan menciptakan suatu kebudayaan, baik berupa nilai dan norma, adat istiadat, dan tradisi lainnya yang dipahami dan dijadikan pedoman hidup berdampingan dalam jangka panjang.

Menurut Soerjono Soekanto, manusia hidup bersama dan menciptakan budaya (Soekanto, 1990, p. 187). Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa budaya, dan sebaliknya tidak ada budaya tanpa masyarakat sebagai wadah dan masyarakat sebagai pendukungnya. Tinggal dalam komunitas untuk waktu yang lama dapat menciptakan aturan dan pedoman yang berbeda untuk menjalani kehidupan yang aman dan damai, aturan-aturan tersebut dapat berbentuk agama atau budaya, yang menarik adalah ketika fenomena agama dan budaya hidup berdampingan di masyarakat. Tentu tidak bisa dipahami secara sepihak. Namun harus dipahami sepenuhnya terhadap proses dialektika agama dan budaya dalam masyarakat itu sendiri.

Agama dan budaya adalah dua hal yang dapat eksis dan berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika berbicara tentang agama dan budaya, maka tidak hanya melihat penerapan fungsinya dalam bentuk sistem budaya dan adat, tetapi juga muncul dalam upacara keagamaan. Fenomena hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat berbeda dalam sifat hubungannya. Fenomena hubungan ini sangat tergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri, contohnya jika agama dikaitkan dengan budaya masyarakat pedesaan, maka pola hubungan dengan masyarakat perkotaan akan berbeda. Faktanya, bukan hanya fenomena kedaerahan yang menentukan, tetapi juga fenomena etnis. Misalnya, tentu akan berbeda jika membicarakan hubungan agama dan budaya antara orang Jawa dengan orang Sunda (Miharja, 2019, p. 2).

Mengangkat isu Islam dan budaya Sunda merupakan pembahasan yang menarik. Islam sebagai agama universal membawa berkah bagi seluruh alam semesta di bumi. Jika dilihat dari proses Islamisasi di tatar Sunda, ajaran Islam telah bercampur dengan budaya lokal masyarakat. Kedua bagian itu saling mendukung dan melengkapi. Eksistensi Islam dalam masyarakat yang sudah memiliki budaya sendiri menjadikan Islam berproses secara dialektis yang membentuk pola hubungan yang khas. Hasil dari proses dialektika tersebut diwujudkan dalam berbagai tradisi ritual keagamaan masyarakat Islam Sunda.

Itulah yang diduga, ketika beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati Dedi Mulyadi, seperti pohon-pohon dibungkus dengan kain putih hitam, memasang janur-janur di pinggir jalan, membuat patung-patung tokoh pewayangan di berbagai sudut jalan kota, pemberlakuan salam *sampurasun* dalam setiap acara, dan *ngamumule* kembali ajaran *Sunda*, kemudian mengundang perbincangan dari berbagai kalangan (Net Biro Jawa Barat, 2016).

Kebijakan berbasis kebudayaan Sunda dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut melahirkan pro dan kontra, kontra datang dari salah satu Ormas Islam yang terjadi pada kurun waktu 2008-2018, dan hal ini sekaligus menjadikan Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan dari berbagai pihak. Kebijakan yang melahirkan pro dan kontra tersebut terlihat menjadi sebuah dinamika atau konflik antara agama Islam itu sendiri dengan budaya Sunda.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dinamika budaya dan agama pada studi kebijakan bupati Dedi Mulyadi dan ormas Islam di Purwakarta, *pertama* sebuah skripsi yang ditulis oleh Nuri Novia dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 2019 dengan judul *Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya (Analisis terhadap Kebijakan Politik Budaya Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta tahun 2008-2015)* (Novia, 2019). Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta yang banyak mengeluarkan kebijakan kebudayaan Sunda dan direspon oleh masyarakatnya. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis tulis adalah fokus pada analisis pencarian nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kebijakan bupati Dedi Mulyadi dalam menerapkan kebudayaan Sunda di Purwakarta.

Kedua, artikel dengan judul *Budaya Lokal Versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi* ditulis oleh Yanwar Pribadi dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurnal Multikultural dan Multireligius Volume 12 Nomor 3 tahun 2016 (Pribadi, 2016). Artikel ini membahas mengenai perseteruan antara pemimpin FPI Habib Rizieq dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Perbedaan dengan artikel yang penulis tulis adalah berfokus pada analisis pencarian nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kebijakan kebudayaan Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Ketiga, artikel dengan judul *Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Konflik Sampurasun: Dedi Mulyadi VS FPI*, ditulis oleh Annisa Maharani Rahayu dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 (Rahayu, 2017). Membahas mengenai kebijakan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam menerapkan salam Sunda yaitu *sampurasun* dalam setiap acara dan kegiatan, hal ini direspon oleh ketua FPI. Perbedaan dengan artikel yang penulis tulis adalah berfokus pada menggali dan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kebijakan kebudayaan Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Dengan demikian pada tulisan ini membahas mengenai dinamika agama dan budaya dengan studi analisis atas pencarian nilai-nilai Islam dalam kebijakan budaya Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Karena dalam setiap budaya pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya (dalam istilah Sunda disebut dengan *siloka*). Kebijakan budaya Sunda yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi sebagai Bupati di Purwakarta ternyata mengandung nilai dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga hal ini menjadi sebuah jawaban mengenai perseteruan antara Dedi Mulyadi dan salah satu Ormas Islam yang menganggap bahwa kebijakan Dedi Mulyadi telah menjauhkan dari Islam dan bahkan telah berbuat syirik.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Tema penelitian artikel ini adalah dinamika budaya dan agama, kajian analitis tentang

pencarian nilai-nilai Islam dalam kebijakan budaya Sunda pada masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Data untuk artikel ini diambil dari sumber-sumber kepustakaan (bahan-bahan yang bersifat pustakan) seperti buku-buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, dan juga menggunakan sumber audio-visual wawancara Dedi Mulyadi dalam Youtube yang berkaitan dengan objek penelitian. Data disajikan secara naratif-deskriptif dalam arti menyampaikan atau menjelaskan temuan-temuan analitis dari sumber-sumber yang diperolehnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014, pp. 31–33).

Adapun teori yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini adalah teori Lewis Alfred Coser, seorang ahli sosiologi terkenal dari Amerika yang justru mempunyai pandangan yang berbeda terhadap konflik. Coser berpendapat, bahwa konflik memiliki fungsi positif dalam masyarakat (Rofiah, 2017, p. 471).

Teori konflik yang dibangun Lewis A. Coser, dari sejumlah proposisi yang diajukan, intinya mengerucut kepada pernyataan, bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Untuk itu menurut Coser, diperlukan katup penyelamat (*safety-value*) yang berfungsi sebagai jalan keluar dalam meredakan permusuhan (Hernawan, 2014, pp. 22–23).

3. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Islam dan Budaya Sunda di Purwakarta Masa Bupati Dedi Mulyadi

Agama sebagai doktrin agama yang lengkap (Islam) memberi ruang bagi dua macam persepsi keagamaan yaitu yang pertama adalah eksoteris (*zhahiri*), yaitu evaluasi keagamaan (*fihiyyah*) berdasarkan bentuk atau norma dan aturan agama yang ketat. Kedua, *bathin* atau penghayatan keagamaan yang diarahkan dan difokuskan pada inti dan tujuan keagamaan. Tekanan yang berlebihan pada salah satu aspek tersebut menciptakan ketidakseimbangan yang merusak keseimbangan Islam (*tawazun*) (Miharja, 2019, p. 39).

Islam dan budaya sangat erat hubungannya, Islam sebagai agama universal memberi manfaat bagi alam semesta dan keberadaannya menyatu dengan budaya lokal. Perpaduan Islam dan budaya lokal idealnya menjadi bagian pendukung dan pelengkap. Namun realita di lapangan, perbauran Islam dan budaya tidak jarang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik. Hal tersebut seperti terjadi pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi.

Tidak jarang niat ideal Bupati Dedi Mulyadi mengundang banyak perbincangan, sehingga menimbulkan pro dan kontra sebagai reaksi atas kebijakan yang dikeluarkannya. Kalangan yang pro terhadap kebijakan bupati pada saat itu, misalnya, membungkus pohon-pohon dengan kain hitam-putih, hal tersebut merupakan bagian dari asesoris penambah estetika (keindahan). Pertimbangannya, ketimbang pohon-pohon ditumpangi iklan-iklan baligo yang dipaku dengan logam besi berbagai ukuran yang mengakibatkan rusaknya pohon tersebut (Indonesian Freethinker Encyclopedia, 2016).

Dedi Mulyadi pun dalam keterangannya, mengatakan bahwa ketika pohon dikasih kain maka tidak akan ada yang berani memakunya. Lebih mulia pohon dikasih kain, dibanding dipakuin dan ditempli iklan. Ilmu lingkungan mengajarkan proses perlindungan dan proses memuliakan pohon akan memberikan energi bagi lingkungan yang memberikan air sebagai penyerapan dalam tanahnya, serta menghasilkan oksigen di atasnya. Untuk itu, menyarungi pohon merupakan bagian dari kebudayaan memuliakan pohon yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang menebang pohon secara liar dan eksploitatif. Kosepsi itu merupakan bagian dari strategi dan sistem kebudayaan Sunda (Channel Pilkada, 2018).

Adapun kelompok yang kontra dengan kebijakan tersebut, menganggap, bahwa menyarungi pohon dengan kain hitam-putih memberikan tanda bahwa pada lokasi tersebut ditempatkan energi roh para *bhuta* atau penunggu karang (*dahyangan*) dan menyerupai dengan adat Hindu di Bali. Perilaku tersebut merupakan persoalan *i'tikad* (keyakinan), yaitu Bupati Dedi Mulyadi ingin memasyarakatkan budaya Hindu di tengah masyarakat Sunda yang sudah identik dengan Islam

(Ujang, 2016).

Di zaman modern orang-orang dengan aktivitas dan minat yang berbeda datang dan pergi. Individu atau kelompok mungkin mengalami disfungsi atau bersentuhan dengan individu atau kelompok lain, yang mengarah pada konflik. Namun konflik juga berperan positif dalam memperkuat kohesi dan menghilangkan konflik internal dalam kelompok. Segala bentuk konflik adalah hal yang wajar. Selalu ada konflik dalam sistem sosial apa pun. Konflik adalah karakteristik dari sistem sosial. Tidak ada hubungan yang bertahan tanpa konflik. Di sisi lain, kurangnya konflik dapat menandakan munculnya masalah mendesak yang suatu hari akan menyebabkan ledakan yang benar-benar kacau. Untuk itu, diperlukan sebuah teori yang akan menekan atau bahkan menghancurkan konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Melihat manifestasi konflik yang sering muncul dalam struktur sosial masyarakat, para sosiolog menawarkan ide yang berbeda untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada di masyarakat. Misalnya George Simmel dan Max Weber berpendapat bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam realitas sosial masyarakat, tetapi konflik memainkan peran positif dalam mempertahankan masyarakat, yaitu mempromosikan kohesi (Aude, 2008).

Konflik dan pertengkaran yang terjadi di masyarakat seringkali dipandang sebagai masalah yang sangat kompleks. Dua pihak yang berselisih atau berkonflik tidak dapat berdamai, baik dalam hubungan mereka maupun dalam kehidupan sosial mereka yang lain. Sosiolog Amerika terkemuka Louis Alfred Coser memiliki pandangan yang positif terhadap adanya konflik di masyarakat (Rofiah, 2017, p. 471).

Teori konflik Coser merupakan kelanjutan dari pandangan sosiolog Jerman Georg Simmel tentang konflik. Louis Coser berpendapat bahwa konflik dapat secara positif mendukung struktur sosial dan hanya membutuhkan katup pengaman yang berfungsi sebagai cara untuk meredam permusuhan (Hernawan, 2014, pp. 22–23). Dinamika yang terjadi di Purwakarta mengenai kebijakan kebudayaan sunda dengan kelompok masyarakat Islam yang menentang bahwa kebijakan tersebut sudah menyentuh dan menggeser dasar aqidah dan keyakinan umat Islam pada masa kepemimpinan Dedi Mulyadi menurut Coser justru menjadi hal yang positif, tinggal mencari katup pengaman untuk meredakan pertentangan tersebut. Diantara katup pengaman tersebut adalah kajian akademis dengan melakukan penelitian, apakah betul kebijakan berbasis kesundaan Dedi Mulyadi di Purwakarta melanggar syariat Islam, atau sebaliknya malah mengandung nilai-nilai atau substansi ajaran Islam. Maka inilah yang akan menjadi katup peredam perselisihan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut.

Kebijakan Budaya Sunda masa Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta

H. Dedi Mulyadi S.H merupakan bupati kesepuluh Purwakarta yang menjabat selama dua periode. Sebelum menjadi bupati, Dedi Mulyadi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari tahun 1999 hingga 2004 dan Wakil Bupati Purwakarta dari tahun 2003 hingga 2008. Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 dan meraih gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purwakarta (Novia, 2019, p. 2). Dedi Mulyadi pertama kali dilantik sebagai Bupati Purwakarta pada 13 Maret 2008, berpasangan dengan Wakil Bupati Dudung B. Supardi. Dedi Mulyadi kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan kedua untuk memimpin Purwakarta bersama wakilnya Dadan Koswara (Hardjasaputra, 2008, p. 90).

Dedi Mulyadi adalah sosok pemimpin yang mempunyai ciri khas, selain seorang bupati, beliau juga adalah seorang budayawan sunda. Maka tidak aneh dalam setiap kebijakannya menerapkan kebudayaan Sunda, hal ini pula yang menjadikan Purwakarta istimewa dan dikenal ditingkat nasional dan internasional. Kebijakan penerapan kebudayaan Sunda di Purwakarta masa kepemimpinan Dedi Mulyadi ini diterapkan dalam segala bidang termasuk dalam bidang sosial, politik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Kebijakan penerapan kebudayaan Sunda di Purwakarta terlihat misalnya dalam bentuk bangunan yang diseragamkan dengan menggunakan model *atap julang ngapak*, menggunakan *gapura malati sapasi* dengan warna cet hitam dan putih. Lalu pada tahun 2010 Dedi Mulyadi menghiasi tatanan kota dengan lampu hias yang dibalut dengan hiasan berbahan dasar bambu. Dedi Mulyadi juga

membangun patung tokoh-tokoh pewayangan seperti Semar, Arjuna dan lain sebagainya di setiap perempatan jalan kota dan memberikan sarung pada pohon dengan motif kotak-kotak berwarna hitam-putih.

Usaha Dedi Mulyadi dalam melestarikan budaya Sunda diantaranya dengan mengadakan festival-festival, pada tahun 2012 misalnya pemerintah Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan festival *ngarak tumpeng* terbanyak. Untuk melestarikan berbagai budaya Sunda, Dedi Mulyadi menggelar festival yang menampilkan 1000 *enggrang* yang merupakan mainan tradisional Sunda. Selain itu, ada 1001 bedug selama bulan puasa. Di bidang kesehatan, Dedi Mulyadi melakukan operasi katarak paling banyak dengan total 198 pasien menjalani operasi (Bappeda Kabupaten Purwakarta, 2015).

Pada tahun yang sama, di bidang pendidikan, Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan berdasarkan budaya Sunda bahwa semua guru SD, SMP, dan SMA harus mengenakan kebaya untuk wanita dan pakaian pangsi untuk pria. Kebijakan lainnya adalah *gempungan di buruan urang lembur* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta pada periode pertama, banyak memberlakukan kebijakan berbasis budaya Sunda melalui festival, pembangunan infrastruktur perkotaan dan gedung pemerintahan, serta penggunaan pakaian adat Sunda seperti kebaya dan pangsi. Di sisi lain, pada periode kedua, Dedi Mulyadi menerapkan desa budaya, pendidikan karakter, dan tokoh Sunda yang menjadi nama sekolah. Dedi Mulyadi menyelenggarakan safari budaya keliling Jawa Barat secara rutin setiap hari Sabtu.

Kebijakan Dedi Mulyadi dalam pemerintahan merupakan aplikasi dari pemikirannya yang berbasis budaya Sunda. Menurut Dedi Mulyadi, kepemimpinan itu harus seperti mengendarai sepeda dengan cinta. Karena memimpin suatu negara tidak seperti merawat benda mati (Mulyadi, 2014, p. 7).

Pencarian Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Budaya Sunda masa Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta

Atas kebijakan berbasis kebudayaan Sunda dari Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta tersebut mendatangkan pro dan kontra. Kontra datang dari organisasi masyarakat Islam bernama Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Pertentangan antara Habib Rizieq Shihab dengan Dedi Mulyadi ini adalah dampak dari hubungan Islam dan budaya lokal Jawa Barat yaitu Sunda. Memang betul bahwa sudah sejak lama ajaran atau *syariat* Islam telah berinteraksi dengan budaya lokal termasuk kebudayaan Sunda, baik berujung pada konflik ataupun akomodasi (Pribadi, 2016, p. 79).

Namun dalam studi kasus di Purwakarta ini, nampaknya komunikasi antara agama Islam dan budaya Sunda melahirkan suatu konflik dan terjadi polarisasi di masyarakat yang saling berhadapan yaitu masyarakat yang pro dan yang kontra. Dalam teorinya Coser, konflik justru akan mengakibatkan hal positif bagi suatu masyarakat. Diantara hal positif disini masyarakat akan melakukan kajian-kajian akademis dalam menanggapi konflik tersebut, sehingga bisa menentukan sikap selanjutnya.

Pertentangan ini dimulai ketika Habib Rizieq Shihab menganggap bahwa penerapan salam Sunda yaitu *sampurasun* yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta telah menjauhi nilai-nilai dan ajaran Islam dan dianggap menggantikan salam Islam dengan salam Sunda serta dicap telah berbuat syirik. Oleh karena itu, ketika Habib Rizieq Shihab berceramah di Purwakarta mempelesetkan salam Sunda *sampurasun* dengan kata *campur racun* (Rahayu, 2017, p. 18).

Kebijakan Dedi Mulyadi untuk membiasakan salam Sunda yaitu *sampurasun* dalam setiap acara. Hal ini pun yang menjadi masalah Dedi Mulyadi dengan salah satu ormas Islam yaitu FPI yang dianggap menggantikan salam Islam dengan salam Sunda tersebut. Hal ini dibantah oleh Dedi Mulyadi, bahwa dirinya bukan menggantikan tapi menambahkan setelah berucap salam Islam yaitu *assalamualaikum* sebagai identitas kemusliman maka dilanjutkan dengan pembiasaan salam Sunda yaitu *sampurasun* sebagai identitas ke-Sundaan (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita INews, dalam; INews Magazine, 2017b).

Tegas Dedi Mulyadi bahwa dua salam tersebut memiliki makna yang sama yaitu hidup harus saling membukakan, hidup harus saling memaafkan, hidup harus saling mengasihi dan hidup harus saling memberkahi. Oleh karena itu kedua salam tersebut sama pentingnya, namun tetap salam sunda diucapkan setelah salam Islam, disini juga menyiratkan bahwa agama tetap menjadi hal yang penting.

Untuk kepentingan melihat kebijakan-kebijakan budaya Sunda Dedi Mulyadi dalam memimpin Purwakarta terlihat dalam makna yang terkandung di dalamnya yang memang bagian dari ajaran dan syariat Islam. Contohnya kebijakan pohon dikasih kain, hal ini memang khas Bali tapi bukan khas agama Hindu. Terkait dengan kebijakan pohon dikasih sarungan kain adalah mengenai hal estetika atau keindahan saja. Pohon dikasih kain akan lebih indah dari pada ditempelkan papan iklan. Dalam Islam keindahan itu dijunjung tinggi, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan” (H.R. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).

Adapun mengenai warna sarungnya yang hitam-putih, hal ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sunda yang memiliki makna filosofi dan bernilai eksentrik (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita Viva, dalam; Viva.co.id, 2016).

Kebijakan selanjutnya mengenai pembangunan patung di setiap perempatan jalan kota, Dedi Mulyadi menjawab bahwa di Purwakarta patung bukanlah hal yang baru, karena Purwakarta mempunyai industri keramik Plered yang membuat celengan dari tanah liat, dan salah satunya adalah celengan semar, maka terkenallah *cengcelengan paled*. Lalu dibuatkan *cengcelengan* besar (patung), seperti patung semar, arjuna, harimau dan lain-lain. Mengenai pemberhalaan terhadap patung-patung tersebut, Dedi Mulyadi mempertanyakan kenapa patung lodaya kepolisian tidak dimasalahkan sebagai berhala? (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita Viva, dalam; Viva.co.id, 2016).

Kebijakan pembutan patung tokoh-tokoh pewayangan di Purwakarta tidak untuk dijadikan pemberhalaan atau usaha untuk merubah atau menggeser keyakinan umat Islam, hal ini semata-mata untuk keindahan kota dengan memperkenalkan tokoh budaya dalam lakon pewayangan. Dalam proses Islamisasi bahwa Islam datang ke Nusantara, khususnya ke tanah Pasundan melalui pendekatan budaya, diantaranya dengan pertunjukan wayang. Maka tokoh-tokoh wayah yang dibuatkan patung oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta selaku bupati hanya untuk keindahan kota dan mengingatkan masyarakat bahwa Islam datang melalui kebijaksanaan yang dilakonkan oleh tokoh-tokoh pewayang.

Dedi Mulyadi menuturkan bahwa Islam bisa diterjemahkan dalam jalan nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, termasuk wilayah dan masyarakat Sunda. Bahwa nilai dan ajaran Islam menurut keyakinan Dedi Mulyadi adalah menyantuni anak yatim, mengurus jompo, pemerintah yang bersih dan demokratis, hematnya adalah mengaplikasikan Islam secara substansial (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita MerdekaDotCom, dalam; MerdekaDotCom, 2016).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penerapan Islam secara substansial lebih penting dari pada penerapan atau cara beragama yang hanya formalistik saja. Artinya kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta dengan pendekatan budaya lokal memiliki atau mengandung nilai-nilai Islami. Karena sejatinya Islam dengan kebudayaan Sunda tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam sejarah dakwah wali sanga menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya, sehingga kehidupan beragama dalam suatu masyarakat tersebut tidak merasa kehilangan jati dirinya. Karena budayanya sudah bernafaskan Islam.

Mengenai kebijakan *ngamumule* atau melestarikan kembali ajaran dan budaya Sunda atau Sunda Wiwitan, Dedi Mulyadi menuturkan bahwa Sunda Wiwitan adalah sistem nilai ajaran kebudayaan yang hidup di tatar Sunda sejak tanah Sunda dihuni oleh manusia. Kemudian masyarakat Sunda tersebut memiliki metodologi pengelolaan lingkungan. Hematnya Sunda Wiwitan adalah ilmu pengelolaan lingkungan dan sistem sosial alam Sunda. Pengelolaan lingkungan yang merupakan titipan dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sebagai *khalifah* atau pemimpin

di dunia (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita INews, dalam; INews Magazine, 2017a).

Jadi pemahaman Sunda Wiwitan Dedi Mulyadi bukan pemahaman keyakinan atau keimanan, namun yang diambil dari *ngamumule ajaran sunda wiwitan* adalah ilmu merawat alam, saling membantu dan menyayangi terhadap sesama manusia, tidak bersikap serakah dan eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam. Hal inilah yang berusaha dilestarikan oleh Dedi Mulyadi dalam memimpin Purwakarta.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, sebagai agama universal, Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk perlakuan etis terhadap alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Semua kebutuhan manusia berasal dari alam dan dipenuhi oleh lingkungan alam, baik tumbuhan maupun hewan. Oleh karena itu, Islam menasihati melalui Al-Quran bahwa manusia harus menjaga lingkungan alam, jangan sampai kelangsungan hidup terhalang oleh tindakan kelompok orang yang tidak ingin melindungi alam. Berdasarkan hal ini, ajaran Islam memberikan indikasi bagi manusia untuk bertindak etis juga terhadap lingkungan.

Mengenai pembangunan infrastruktur yang mengedepankan nuansa budaya Sunda yang begitu kental dalam pembangunan, contohnya dalam arsitektur kantor bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa energi leluhur selalu tetap hidup dan akan menjadi nilai akademik, gagasan ide, dan nilai arsitektur.

Hal ini di dalam dunia mistisme Islam disebut dengan istilah *tawasul* yaitu proses interaksi antara manusia dengan leluhurnya dengan membacakan surat Al-fatihah. Bahkan dalam salah satu bacaan Shalat berbunyi *assalamualaika ya ayyuhannabiyu warahmatullah* yang maknanya adalah berucap salam kepada Nabi Muhammad Saw sebagai leluhur masyarakat Muslim (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita INews, dalam; INews Magazine, 2017a).

Manajerial pembangunan Dedi Mulyadi haruslah memiliki makna filosofi kebudayaan yaitu tanah, air, udara dan matahari serta ada manusia di dalamnya. Pembangunan harus berangkat dari apa yang dimiliki maka akan melahirkan otonomisasi energi, kehidupan, lingkungan dan kesemestaan. Alhasil, kebijakan berbasis budaya Sunda yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi selama memimpin di Purwakarta mengandung nilai dan ajaran Islam. Artinya secara substansi dan esensi kebijakan Sunda tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan norma-norma Islam, karena yang terpenting adalah beragama secara substansi sehingga tidak hanya mementingkan beragama secara formalistik saja.

Inilah yang menurut Coser sebagai katup penyelamat dalam meredem konflik di masyarakat. Katup penyelamat dalam kasus dinamika agama Islam dan budaya Sunda masa kepemimpinan bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta adalah studi ilmiah atau analisis yang mendalam bahwa kebijakan budaya Sunda Dedi Mulyadi mengandung atau memiliki makna ajaran Islam secara substansial serta tidak bertentangan dengan aqidah agama Islam itu sendiri.

4. Penutup

Dedi Mulyadi merupakan bupati Purwakarta dua periode, ia berhasil membawa Purwakarta sebagai kota berbasis budaya Sunda sehingga terkenal secara nasional dan internasional. Penerapan kebijakan Dedi Mulyadi yang banyak menggunakan pendekatan budaya Sunda dan akhirnya melahirkan pro dan kontra, sehingga terlihat ada pertentangan antara budaya Sunda dengan ajaran Islam. Namun pada hakikatnya kebijakan kebudayaan Sunda yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta memiliki esensi dan substansi nilai serta ajaran Islam, hal ini pula yang menjadi katup penyelamat konflik masyarakat di Purwakarta tersebut dalam teorinya Lewis Alfred Coser. Kebijakan penyarungan pepohonan misalnya, hal ini semata-mata untuk keindahan dan bernilai estetika, dan Islam menjunjung tinggi nilai keindahan tersebut. Lalu mengenai melestarikan ajaran Sunda adalah menerapkan ilmu dan metode terhadap pengelolaan alam secara baik dan bersikap saling mengasahi dan tolong-menolong dengan sesama. Selanjutnya mengenai pembangunan infrastruktur bernuansa budaya Sunda, hal ini adalah sebagai bentuk *tawasul* dalam ajaran agama Islam sebagai bentuk interaksi antara manusia dengan leluhurnya. Terakhir mengenai pembiasaan

salam Sunda setelah salam Islam, kedua salam tersebut memiliki makna yang sama yaitu untuk saling memberkahi.

5. Acknowledgments

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dalam bentuk artikel ilmiah. Penelitian ini tidak dibiayai oleh institusi manapun, tetapi murni atas inisiatif penulis sendiri. Terima kasih.

6. Daftar Pustaka

- Aude, S. (2008). Telaah tentang Fungsionalitas Konflik dalam Masyarakat Menurut Lewis a. Coser. Retrieved October 23, 2022, from <http://sapereaudenias.blogspot.com/2008/08/telaah-tentang-fungsionalitas-konflik.html>
- Bappeda Kabupaten Purwakarta. (2015). *Daftar Prestasi Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2015*. Purwakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Channel Pilkada. (2018). Pertanyaan Syaikhu ke Dedi Mulyadi, Pohon Kok Dikasih Kain. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=SoBgke1S96A>
- Garna, J. K. (2001). *Ilmu-ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Pascasarjana Unpad.
- Hardjasaputra, A. S. (2008). *Sejarah Purwakarta*. Purwakarta: Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.
- Hernawan, W. (2014). *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*. Bandung: YMSI Cabang Jawa Barat dan PUI Jawa Barat bekerjasama dengan Divisi CSR Bank Jabar Banten (BJB) Pusat.
- Indonesian Freethinker Encyclopedia. (2016). Bupati Purwakarta Dijuluki “Raja Syirik” Oleh FPI. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=uL69xDa65LQ>
- INews Magazine. (2017a). Bukan Ajaran Sesat, Sunda Wiwitan adalah Ilmu Mengelola Alam Part 02 - iTalk 07/06. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=ENQkl3g0huI>
- INews Magazine. (2017b). Gebrakan Dedi Mulyadi Sebagai Bupati Purwakarta Selama 2 Periode Part 01 - iTalk 07/06. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=zet9dCW9ZE>
- Jakob, S. (2011). *Sunda Pola Rasionalitas Budaya*. Jakarta: Kelir.
- MerdekaDotCom. (2016). Sosok Bupati yang keras terhadap FPI. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=Wszv2g0AKg>
- Miharja, D. (2019). *Islam dan Budaya Sunda*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Sari.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Mulyadi, D. (2014). *Menggayuh Negeri Dengan Cinta*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Net Biro Jawa Barat. (2016). Net Jabar-Pembakaran Patung Arjuna Memanah. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=vdX_z2b53LA
- Novia, N. (2019). *Kebijakan pemerintah berbasis budaya: Analisis terhadap kebijakan politik budaya Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta Tahun 2008-2015* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/20358/>
- Pribadi, Y. (2016). Budaya Lokal Versus Islam: Perseteruan Antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15(3), 75–86. Retrieved from <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/45>
- Rahayu, A. (2017). Implementasi Kebijakan Konflik Sampurasun: Dedi Mulyadi VS FPI. *Public Policy Unnes Student Working Paper Series 2017*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/319311124_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_KONFLIK_SAMPURASUN_DEDI_MULYADI_VS_FPI
- Rofiah, K. (2017). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), 469–490. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syam, N. (2004). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Ujang. (2016). “Hinduisasi” Purwakarta ala Dedi Mulyadi, Anda akan Tercengan! Retrieved from <https://youtu.be/tIWQLdYrcB0>
- Viva.co.id. (2016). Dijuluki “Raja Syirik”, Ini Jawaban Bupati Purwakarta. Retrieved October 23, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=jDEIkszVATk&t=411s>